
Keuntungan Pemerintah Kanada Bergabung Dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) Tahun 2011-2016

Ni Putu Trisna Dewi¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan kepentingan pemerintah Kanada bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2011 hingga 2016 menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan satu kerangka teori dan satu kerangka konseptual yakni teori Neoliberal-Institusionalisme dan konsep kerja sama internasional. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi kepentingan utama Kanada bergabung dalam TPP terlepas dari penolakan, hambatan dan kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan dari keikutsertaan tersebut. Teori Neoliberal-Institusionalisme ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana strategi Kanada melibatkan diri dalam kerja sama TPP dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Konsep kerja sama internasional membantu peneliti untuk menjabarkan secara lebih terperinci mengenai tujuan Kanada bergabung dalam TPP. TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin. Keuntungan Kanada bergabung dalam TPP tidak serta merta berupa kepentingan dalam bidang ekonomi saja melainkan kepentingan dalam bidang lainnya, seperti kepentingan dalam bidang politik dan strategis. Adapun kepentingan politik dan strategis Kanada dalam keikutsertaannya dalam kerja sama TPP, diantaranya; menjalin dan mempererat kembali hubungan diplomatik dengan China, dan menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN khususnya negara yang belum tergabung dalam CPTPP, seperti negara Indonesia dan Thailand melalui *The Strengthening and Expansion of The CPTPP*.

Kata-kunci : CPTPP, Kanada, Keuntungan Strategis, Neoliberal-Institusionalisme, TPP

Abstract

This study aims to describe The Canadian Government's interest in joining the Trans-Pacific Partnership (TPP) in 2011 to 2016 using qualitative-descriptive research methods. This study uses one theory and one concept, there is the Neoliberal-Institutionalism theory and concept of international cooperation. This study focuses on what is in Canada's primary interest in joining the TPP despite the resistance, obstacles and economic losses that such participation would incur. Neoliberal-Institutionalism theory helps researchers to see how Canada's strategy is to involve itself in TPP cooperation in an effort to fulfil its national interest. The concept of international cooperation helps researchers to explain in more detail the purpose of Canada joining TPP. TPP is the first free trade agreement that connects countries in the Asia Pacific and Latin America regions. Canada's interest in joining the TPP is not necessarily an interest in the economic field only, but also interest in other fields, such as interests in political and strategic fields. Canada's political and strategic interests in its participation in TPP cooperation include; establishing and re-strengthening diplomatic relations with China, and establishing cooperation with ASEAN member countries, especially

countries that have not joined yet in the CPTPP, such as Indonesia and Thailand through the Strengthening and Expansion of the CPTPP.

Keywords : *Canada, CPTPP, Neoliberal-Institutionalism, Strategic Interest, TPP*

Kontak Penulis

Ni Putu Trisna Dewi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan P.B. Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali, 80234

Telp: +6282247129137

E-mail: pututrisnadewi5@gmail.com

PENDAHULUAN

Kerja sama dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dengan membentuk hubungan perdagangan antar negara maupun antar kawasan. Salah satu bentuk kerja sama perdagangan internasional yaitu *Trans-Pacific Partnership* (TPP). TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam yang berupaya menghilangkan hambatan tarif dan nontarif untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta untuk menetapkan atau memperluas aturan tentang berbagai masalah termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), investasi asing, dan masalah terkait perdagangan lainnya (Bobby, 2018).

TPP diikuti oleh hampir 37% dari negara penyumbang GDP dunia dan 28% importir dunia. Perjanjian TPP memiliki lima fitur utama yang membedakan kerja sama TPP dengan kerja sama perdagangan lainnya, yaitu; 1). Memiliki akses pasar yang komprehensif, 2). Menggunakan pendekatan regional terhadap komitmen kerja sama, 3). Mengatasi tantangan perdagangan baru, 4). Perdagangan inklusif, dan 5). TPP dirancang sebagai platform untuk integrasi ekonomi regional dan merangkul negara-negara di wilayah Asia-Pasifik (Kelsey, 2010).

Berdasarkan sejarah terbentuknya, TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang pada awalnya diprakarsai oleh tiga negara yakni Chile, Selandia Baru dan Singapura pada perundingan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) Leaders Summit tahun 2002 (New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2015). Awalnya kerja sama ini dinamai dengan *Pacific Three Closer Economic Partnership* (P3 CEP). Kemudian pada tahun 2008 Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden George W. Bush memutuskan untuk bergabung dalam perjanjian ini dan dari sinilah cikal bakal perubahan nama kerja sama ini menjadi *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Keanggotaan TPP terus bertambah yang mana pada tahun 2010 negara Malaysia menyatakan untuk turut bergabung dalam kerja sama ini, kemudian pada tahun 2011 negara Meksiko dan Kanada juga menyatakan turut bergabung dalam keanggotaan TPP. Bergabungnya Kanada dalam TPP membutuhkan proses yang panjang karena terdapat hambatan dan penolakan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Proses bergabungnya Kanada juga menggebu-gebu, yang mana Kanada sampai melakukan *lobbying* selama berbulan-bulan kepada negara anggota lainnya agar bisa mendapatkan undangan untuk bergabung dalam kerja sama perdagangan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan negara anggota TPP lainnya yang tidak memerlukan proses panjang dan *lobbying* untuk tergabung dalam kerja sama TPP.

Kanada bergabung dalam TPP ketika perundingan perjanjian kerja sama ini sudah berada di tengah jalan. Jauh sebelum Kanada memutuskan untuk menjadi *observer* dalam pembahasan perundingan TPP pada tahun 2010, Kanada telah mendapatkan undangan untuk bergabung dalam perundingan TPP tahun 2005 yang sebelumnya bernama TPSEP (*The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*) dengan empat negara anggota yaitu Brunei, Selandia Baru, Chile dan Singapura. Namun, saat itu Kanada menolak untuk bergabung dalam kerja sama tersebut. Alasan Kanada menolak undangan untuk bergabung dalam TPP pada tahun 2005 tidak dijabarkan secara jelas oleh pemerintah Kanada, namun sikap Kanada memperlihatkan bahwa Kanada belum memiliki ketertarikan untuk bergabung dalam kerja sama perdagangan tersebut serta terkesan memberikan penolakan di awal dan membuang jauh kesempatan Kanada untuk bergabung dalam negosiasi Kemitraan TPP (Dawson, 2012).

Berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kanada di tahun 2005 dimana pemerintah Kanada menolak undangan untuk bergabung dalam TPP. Kemudian pada tahun 2011 Kanada justru menyatakan diri ingin bergabung dalam

negosiasi Kemitraan Trans-Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper pada KTT APEC yang berlangsung di bulan November tahun 2011 di Honolulu. Akan tetapi, ketika Kanada menyatakan diri untuk bergabung dalam negosiasi TPP di Honolulu tanggapan negara anggota TPP yakni tidak semua anggota menyambut baik keinginan Kanada untuk bergabung dalam negosiasi. Adapun negara anggota yang memberikan respon berupa penolakan untuk Kanada yaitu negara Amerika Serikat, Selandia Baru dan Australia. Adapun alasan negara Selandia baru menolak keikutsertaan Kanada bergabung dalam negosiasi TPP tahun 2011 yaitu karena pada tahun 2005 Kanada telah mendapatkan undangan untuk bergabung namun kala itu Kanada menolaknya. Sedangkan alasan Amerika Serikat dan Australia memberikan penolakan kepada Kanada yaitu karena aturan *supply management* yang dimiliki oleh Kanada yang dianggap akan bertentangan dengan kebijakan yang telah diatur dalam TPP (Dawson, 2012).

Proses bergabungnya Kanada dalam kerja sama ini membutuhkan waktu yang panjang dan mendapatkan hambatan dari berbagai sisi. Selain disebabkan karena Kanada kurang disambut baik oleh negara anggota TPP. Hambatan lainnya juga datang dari dalam negeri. Banyak protes yang berdatangan dari kelompok sosial Kanada yang tidak menyetujui bergabungnya Kanada dalam TPP, salah satunya yaitu *Dairy Farmers of Canada* (DFC). *Dairy Farmers of Canada* (DFC) merupakan sebuah organisasi untuk para produsen susu di Kanada. Organisasi ini telah didirikan pada tahun 1934 yang bertanggung jawab atas kebijakan, pemasaran, nutrisi, promosi generik dan aktivitas riset pasar yang berkaitan dengan produksi susu di Kanada dan organisasi ini juga merupakan sebuah wadah bagi para produsen susu di Kanada (Holstein, 2015).

Dairy Farmers of Canada (DFC) menganggap bahwa bergabungnya Kanada dalam TPP akan mengacaukan *supply management* yang selama ini telah ditetapkan

oleh pemerintah Kanada. *Supply management* adalah sebuah kebijakan pemerintah Kanada yang mengizinkan para pelaku sektor dairy untuk menetapkan harga secara kolektif bagi konsumennya, sementara pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam penetapan harga tersebut. *Supply management* mencakup 3 pilar utama yaitu *producer pricing*, *production discipline*, dan *import management*. Jika Kanada tetap memutuskan untuk bergabung dalam TPP dan mengabaikan *supply management* maka hal tersebut nantinya akan mengancam industri *dairy* Kanada dan ekonomi Kanada (Lampron, 2018).

Dairy Farmers of Canada (DFC) merupakan sektor terpenting dan juga sebagai sektor pertanian terbesar Kanada yang menyumbang sekitar \$19.9 *Billions* untuk PDB negara setiap tahun atau menghasilkan sekitar 7,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kanada (Government of Canada, 2023). Selain menjadi sektor terpenting DFC juga menopang 220.936 tenaga kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kanada (Edwards, 2018). Namun, terlepas dari hambatan dan protes tersebut Pemerintah Kanada tetap bersikeras menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam TPP dan secara resmi menyatakan ketertarikannya melalui pernyataan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper. Undangan untuk bergabung pun berhasil didapatkan oleh Kanada setelah pemerintah Kanada melakukan *lobbying* dengan negara-negara anggota TPP selama berbulan-bulan.

Kemudian keanggotaan Kanada diumumkan secara resmi oleh TPP pada tahun 2012 berbarengan dengan Meksiko. Keseriusan Kanada untuk bergabung dan memperjuangkan kepentingan negaranya dalam TPP semakin terlihat ketika pemerintah Kanada meratifikasi perjanjian TPP pada 4 Februari 2016 (Aisyah, 2016). Jika dilihat dari hambatan-hambatan dan juga kendala Kanada untuk bergabung ke dalam TPP, seperti tidak disambut baik oleh negara anggota TPP, kacaunya *supply management* dan aksi protes dari DFC. Serta dampak signifikan yang akan

ditimbulkan bagi perekonomian Kanada jika pemerintah Kanada tetap memaksakan untuk bergabung ke dalam TPP. Hal tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti terkait apakah yang menjadi kepentingan utama pemerintah Kanada bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) terlepas dari penolakan, hambatan-hambatan dan konsekuensi yang akan diterima oleh negara Kanada.

Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama ditulis oleh Aprilia Agnesalamah (2017) yang berjudul *Kepentingan Nasional India Dalam Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Literatur ini berfokus pada kepentingan nasional India dalam keanggotaan SCO dan kendala yang dihadapi oleh India untuk menjadi anggota SCO. Dalam tulisannya Agnesalamah (2017) menegaskan bahwa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh India tersebut tidak menghentikan minat India, dan India tetap optimis untuk bergabung ke dalam SCO.

Kemudian literatur kedua ditulis oleh Muhammad Nuzulurridha (2017) yang berjudul *Kepentingan Amerika Serikat Menyepakati Trans-Pacific Partnership* (TPP) Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2015. Literatur ini berfokus pada kepentingan Amerika Serikat bergabung ke dalam TPP dan latar belakang Amerika Serikat menyepakati TPP di kawasan Asia Tenggara. Literatur kedua dari Nuzulurridha (2017) membantu penelitian ini dalam melihat bahwa meskipun kerja sama internasional yang dijalin oleh suatu negara memiliki fokus utama dalam bidang ekonomi, hal tersebut tidak berarti bahwa kerja sama tersebut terbatas hanya untuk kepentingan dan tujuan dalam bidang ekonomi saja. Melainkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam bidang non ekonomi, seperti bidang keamanan dan politik.

Literatur ketiga ditulis oleh Rachmadea Aisyah (2015) yang berjudul *Keikutsertaan Kanada dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership: Sebuah Analisis Liberal*

Intergovernmentalism. Literatur ini menekankan terkait upaya asosiasi-asosiasi bisnis Kanada yang mendorong keikutsertaan Kanada dalam TPP dan menganalisa terkait bagaimana dinamika bergabungnya Kanada dalam TPP serta proses pemerintah Kanada menyepakati perjanjian TPP.

Kemudian penelitian ini menggunakan teori Neoliberal-Institusionalisme dan konsep kerja sama internasional untuk menganalisis kepentingan pemerintah Kanada bergabung dalam TPP. Neoliberal-Institusionalisme memiliki pandangan bahwa kerja sama merupakan sistem yang dirasa sangat cocok untuk menjalin hubungan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan memajukan ekonomi negara (Baldwin, 1993). Neoliberal-Institusionalisme menekankan bahwa suatu negara bergabung dalam organisasi maupun institusi internasional memiliki tujuan untuk memperluas konsepsi kepentingan nasionalnya dalam rangka memperluas wilayah kerja sama. Bagi Neoliberal-Institusionalisme, institusi memiliki peran penting untuk memfasilitasi kerja sama yang mana institusi menunjukkan adanya kesamaan tujuan atau kepentingan bersama dalam kerja sama jangka panjang.

Penjelasan dari teori Neoliberal-Institusionalisme ini akan membantu melihat bagaimana strategi suatu negara melibatkan diri dalam suatu kerja sama dalam upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Serta teori Neoliberal-Institusionalisme juga akan membantu menekankan bahwa suatu negara bergabung dalam organisasi maupun institusi internasional bertujuan untuk memperluas konsepsi kepentingan nasionalnya dalam rangka memperluas wilayah kerja sama. Kerja sama internasional menurut Robert O. Keohane (1989) merupakan suatu kondisi atau aktivitas suatu aktor internasional untuk menentukan kebijakan yang akan mereka bentuk. Robert O. Keohane (1989) juga menyebutkan bahwa kerja sama internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat.

Alasan suatu negara melakukan kerja sama internasional dapat disebabkan karena adanya saling ketergantungan antar negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu negara membutuhkan negara lainnya maka dari itu diperlukan adanya kerja sama. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Konsep kerja sama internasional ini akan membantu peneliti menjabarkan secara lebih terperinci mengenai tujuan suatu negara bergabung dalam kerja sama atau perjanjian internasional. Pada dasarnya alasan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang belum bisa dicapai di dalam negeri. Maka dari itu suatu negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama atau perjanjian internasional.

K.J Holsti (1988: 652) juga menambahkan bahwa kerja sama dalam perspektif liberalisme diperlukan karena dengan kerja sama, apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan dari negara tersebut dapat diperoleh (Azhari,1988). Seperti halnya tujuan Kanada bergabung dalam kerja sama perdagangan internasional TPP yakni tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan domestik Kanada yang ingin dicapai. Kepentingan tersebut berupa kepentingan dalam bidang politik dan kepentingan strategis Kanada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditandai dengan Kanada mencetuskan *The CPTPP As A Pillar of Canadian's Indo-Pacific Strategy*. CPTPP dijadikan pilar utama bagi Kanada dalam pengembangan strategi Indo-Pasifik Kanada dalam melanjutkan perannya di kawasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan kepentingan Kanada bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2011 hingga 2016. Penelitian ini berfokus pada apa

yang menjadi kepentingan utama Kanada bergabung dalam TPP terlepas dari penolakan, hambatan dan kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan dari keikutsertaan tersebut, atau dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis yaitu untuk melihat faktor kepentingan lain yang mendorong keikutsertaan Kanada dalam TPP. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berasal dari literatur atau penelitian terdahulu seperti buku, jurnal ilmiah, media massa (berita) dan situs resmi yang membantu penelitian.

Penelitian ini menggunakan negara sebagai unit analisis yang menganalisis mengenai kepentingan pemerintah Kanada bergabung dalam TPP. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kepustakaan (*library research*). Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *secondary analysis*. Variabel utama dalam penelitian ini adalah pemerintah Kanada yang memutuskan untuk tetap bergabung dalam TPP terlepas dari tahapan panjang serta *lobbying* yang harus dilakukan oleh Kanada, serta terdapat hambatan, dan penolakan dari *Dairy Farmers of Canada* (DFC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Perekonomian Kanada

Kanada adalah salah satu negara maju yang memiliki GDP 1.736,43 *billion US dollars* di tahun 2019 atau sekitar 1,45 persen dari ekonomi dunia (Trading Economy, 2020). Agrikultur merupakan salah satu sektor kunci bagi perekonomian Kanada, sektor agrikultur yang dihasilkan oleh Kanada salah satunya yaitu produksi susu atau *dairy production*. Produksi susu merupakan salah satu dari dua sektor pertanian teratas di tujuh dari sepuluh provinsi yang ada di Kanada. Eco Resources pada tahun 2015 menyebutkan bahwa sektor produksi susu secara nasional menyumbang sebesar \$19.9 *Billions* per tahun untuk perekonomian Kanada atau sekitar 7,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menopang 220.936 tenaga kerja di Kanada.

Sektor produksi susu merupakan salah satu komponen terpenting dan sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Kanada. Hal ini dikarenakan industri susu adalah andalan perekonomian federal dan provinsi di Kanada, sehingga menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kanada. Sebagian besar peternakan sapi perah Kanada berlokasi di dua provinsi yakni Quebec (49%) dan Ontario (32%) (Canadian Dairy Sector Overview, 2018). *Dairy production* menempati peringkat ketiga dalam sektor agrikultur setelah padi dan daging, dengan penjualan susu senilai \$5.456 miliar dan pendapatan peternakan sebesar \$6 miliar pada tahun 2009. Terdapat 12.965 peternakan sapi perah dan 452 pabrik pengolahan susu di Kanada yang menghasilkan penjualan sebesar \$13,7 miliar pada tahun 2009 (Eco Ressources, 2011).

Dairy Farmers of Canada (DFC)

DFC merupakan asosiasi yang dibentuk untuk peternak dan oleh peternak, sehingga DFC begitu penting bagi seluruh komunitas peternak sapi perah Kanada. Sektor peternakan sapi perah Kanada beroperasi berdasarkan manajemen pasokan atau *supply management*. Sistem ini memungkinkan peternak sapi perah Kanada untuk bertindak secara kolektif dalam menegosiasikan harga dan menyesuaikan produksi susu untuk memenuhi permintaan konsumen. *Supply Management* memastikan stabilitas harga susu di Kanada dan menjaga harga supaya tidak terlalu berpengaruh terhadap volatilitas pasar global. Manajemen pasokan memungkinkan peternak sapi perah Kanada untuk memperoleh keuntungan yang relatif stabil dari pasar.

Melalui DFC ini, para peternak sapi perah di Kanada bisa menyuarakan aspirasi dan membela kepentingan mereka baik ditingkat nasional maupun internasional. Adapun visi dari DFC yaitu "*Canadian dairy products for a healthy future*". Kemudian misinya adalah *educate, facilitate, mobilise to ensure the sustainable production of milk and the healthy consumption of Canadian dairy products*. DFC juga memiliki *values* yang dijadikan prinsip dasar

bagi peternak yaitu *sustainability, teamwork, integrity, passion, dan dynamism* (Canadian Dairy Sector, 2018).

Para peternak sapi perah Kanada sangat peduli terhadap kesehatan dan sepenuhnya mendukung tujuan strategi makanan serta minuman sehat untuk membantu konsumen dalam membuat pilihan yang terinformasi dan lebih sehat. Hal ini sesuai dengan visi DFC yakni produk susu Kanada untuk masa depan yang sehat. DFC juga mengedepankan *sustainable dairy production* atau produksi susu berkelanjutan. Keberlanjutan sangat penting bagi masyarakat Kanada dan melalui program keberlanjutan ini, DFC telah membentuk inisiatif ProAction. Inisiatif ProAction bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja nasional yang efisien dan terkoordinasi bagi para peternak sapi perah untuk melanjutkan pengelolaan bisnis produksi susu yang paling aman dan berkualitas tinggi. Melalui inisiatif ProAction, peternak sapi perah Kanada mengambil inisiatif untuk menetapkan, mematuhi, dan terus meningkatkan praktik produksi yang terbaik di dunia demi keberlanjutan industri peternakan.

Kebijakan Supply Management Kanada

Kebijakan manajemen pasokan atau *supply management* ditetapkan oleh pemerintah Kanada pada awal tahun 1970 an untuk memberikan manfaat yang lebih besar, stabilitas pasar, mencocokkan produksi dengan permintaan konsumen dan memastikan keuntungan yang adil bagi peternak. Produk susu Kanada merupakan sektor pertama yang beroperasi di bawah manajemen pasokan. *Supply management* adalah sebuah kebijakan pemerintah Kanada yang mengizinkan para pelaku sektor dairy menetapkan harga secara kolektif bagi konsumennya, sementara pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam penetapan harga tersebut (Lampron, 2018).

Kebijakan manajemen pasokan ini memungkinkan peternak sapi perah Kanada untuk bertindak secara kolektif dalam menegosiasikan harga dan menyesuaikan produksi susu untuk memenuhi permintaan

konsumen. Manajemen pasokan dikelola secara nasional oleh *Canadian Dairy Commission* (CDC), komisi yang berfungsi sebagai sekretariat *Canadian Milk Supply Management Committee* (CMSMC). CMSMC ini bertanggung jawab untuk menilai permintaan konsumen akan produk susu dan menyesuaikan target produksi nasional (Lampron, 2018).

Manajemen pasokan memastikan stabilitas harga susu di Kanada dan menjaga harga supaya tidak terlalu berpengaruh terhadap volatilitas pasar global. Manajemen pasokan memungkinkan peternak sapi perah Kanada untuk memperoleh keuntungan yang relatif stabil dari pasar. Adapun tujuan dari diterapkannya manajemen pasokan susu di Kanada yaitu; 1) Memastikan peternak susu menerima keuntungan yang adil yang diperoleh dari pasar berdasarkan modal dan biaya tenaga kerja, 2) Menyediakan pasokan susu yang stabil bagi pengolah sehingga mereka dapat merencanakan produksinya dengan baik di setiap tahunnya, dan 3) Menyediakan pasokan susu dan produk susu secara konsisten dengan kualitas tinggi dan aman serta dengan harga yang wajar.

Dalam artikel yang berjudul *Canadian Dairy Sector Overview* yang ditulis oleh Lampron (2018), disebutkan bahwa kebijakan *supply management* mencakup 3 pilar utama yaitu *producer pricing* atau penetapan harga produsen, *production discipline* atau disiplin produksi, dan *import management* atau manajemen impor. Jika ketiga pilar manajemen pasokan ini berfungsi dengan baik, maka sangat memungkinkan bahwa industri susu di Kanada dapat mengatasi badai ekonomi maupun ketidakstabilan dalam pasar global sehingga tetap berkelanjutan dan mandiri. Apabila manajemen pasokan tidak diterapkan maka nantinya akan merugikan peternak. Karena biaya produksi yang relatif tinggi di Kanada (karena kondisi iklim yang lebih dingin), sifat produk mereka yang mudah rusak, dan didorong oleh ketidakstabilan harga global, banyak peternak sapi perah Kanada akan gulung tikar. Kemudian hal ini akan

menempatkan sektor DFC dalam bahaya yang tentunya akan merugikan masyarakat Kanada, konsumen Kanada, peternak Kanada dan berdampak pula terhadap perekonomian Kanada (Canadian Dairy Sector, 2018)

Hambatan Kanada Bergabung Dalam TPP

Keputusan pemerintah Kanada bergabung dalam TPP harus melewati dinamika yang panjang. Kanada bergabung dalam kerja sama ketika perundingan perjanjian kerja sama ini sudah berada di tengah jalan. Proses panjang dan *lobbying* harus dilalui oleh pemerintah Kanada untuk bergabung dalam TPP. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan dan penolakan dari berbagai sisi yakni dari dalam dan luar negeri. Hambatan dari luar negeri berupa penolakan dari negara anggota TPP dan tidak semua



Gambar 1. Aksi Protes dari Peternak Quebec
Sumber: Antoni Nerestant (2015)

anggota menyambut baik keinginan Kanada untuk bergabung dalam negosiasi. Adapun negara anggota yang memberikan respon berupa penolakan untuk Kanada yaitu negara Amerika Serikat, Selandia Baru dan Australia.

Adapun alasan negara Selandia baru menolak keikutsertaan Kanada bergabung dalam negosiasi TPP tahun 2011 yaitu karena pada tahun 2005 Kanada telah mendapatkan undangan untuk bergabung namun kala itu Kanada menolaknya. Sedangkan alasan Amerika Serikat dan Australia memberikan penolakan kepada Kanada yaitu karena aturan *supply management* yang dimiliki oleh Kanada

yang dianggap akan bertentangan dengan kebijakan yang telah diatur dalam TPP. Kemudian hambatan dari dalam negeri berupa penolakan dan protes yang berdatangan dari kelompok sosial Kanada yang tidak menyetujui bergabungnya Kanada dalam TPP, salah satunya yaitu *Dairy Farmers of Canada* (DFC).

DFC menganggap bahwa bergabungnya Kanada dalam TPP akan mengacaukan *supply management* yang selama ini telah diterapkan oleh pemerintah dan juga dapat mengancam keberlangsungan industri *dairy* Kanada serta ekonomi negara. Penolakan yang dilakukan oleh DFC terhadap pemerintah Kanada dituangkan ke dalam beberapa aksi. Salah satunya berupa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para peternak dari provinsi Quebec, yang mana Quebec merupakan provinsi dengan jumlah peternak sapi perah terbanyak di Kanada yakni 6.375 atau 49,2% dari 12.965 atau setengah dari total jumlah peternak yang ada di Kanada (Nerestant/CBC, 2015).

Para peternak melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan kantor pusat CBC di Montreal Maison Radio-Canada, kota Quebec. Mereka membawa dua ekor sapi perah ke lokasi sebagai bentuk protes terhadap usulan pemerintah Kanada yang ingin bergabung dalam TPP dan memegang poster yang bertuliskan pemerintah federal harus mendukung peternakan lokal.

Kekhawatiran peternak tentang dampak yang akan ditimbulkan dari usulan TPP dapat terlihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan. Mereka menyerukan bahwa usulan pemerintah tersebut akan merugikan industri susu Kanada dan akan membuka peluang bagi negara Kanada untuk pertama kalinya memasuki pasar Asia yang dinamis dan khususnya Jepang yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Yang mana kondisi tersebut tentunya akan merugikan sektor DFC Kanada dan perekonomian negara.

Menurut penelitian dari Co-operative Agropur, penghapusan sistem *supply management* untuk DFC akan mengancam 4.500 hingga 6.000 peternakan dan mengancam

24.000 lapangan kerja di seluruh wilayah Kanada (Nerestant/CBC, 2015). DFC menegaskan bahwa mereka akan memperjuangkan keberlanjutan dari penerapan kebijakan *supply management* untuk mensejahterakan para peternak di Kanada.

Upaya Kanada Bergabung Dalam TPP

Terlepas dari proses panjang dan hambatan Kanada untuk bergabung dalam TPP, pemerintah Kanada tetap memikirkan bagaimana upaya agar Kanada bisa menemukan kesepakatan untuk bergabung dalam TPP. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kanada adalah mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk didalamnya yaitu pemilik usaha, *think tanks*, akademisi, masyarakat sipil, kelompok adat, pelajar dari semua wilayah dan provinsi. Serta mengundang para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk membahas dan berkonsultasi terkait ketertarikan Kanada bergabung dalam TPP.

Pemerintah juga membuka konsultasi secara online yang terbuka untuk seluruh masyarakat Kanada yang ingin menyampaikan pendapatnya (Bobby, 2018). Kemudian adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kanada untuk mendapatkan undangan bergabung dalam TPP yakni dengan cara melakukan *lobbying* dengan Amerika Serikat. Kanada membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan AS seperti *intellectual property*, agrikultur, dan investasi. Upaya itu pun membuahkan hasil dan Kanada berhasil mendapatkan undangan untuk bergabung menjadi anggota TPP (Kelsey, 2010).

Kepentingan Pemerintah Kanada Bergabung Dalam TPP

Kanada secara resmi bergabung dalam TPP pada tanggal 4 Februari 2016 yang ditandai dengan Perdana menteri Kanada, Justin Trudeau meratifikasi perjanjian TPP. Bergabungnya Kanada dalam TPP merupakan sebuah strategi bagi pemerintah Kanada dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini sesuai dengan teori Neoliberalisme (Neoliberal-Institusionalisme) yang melihat

bagaimana strategi suatu negara melibatkan diri dalam suatu kerja sama dalam upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Baldwin (1993) juga menyatakan teori Neoliberal-Institusionalisme memiliki pandangan bahwa kerja sama merupakan sistem yang dirasa sangat cocok untuk menjalin hubungan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan memajukan ekonomi negara.

Pemerintah Kanada melihat bahwa kerja sama TPP bukanlah sekedar kerja sama dalam bidang ekonomi dan atau perdagangan antar negara saja, melainkan TPP lebih dari itu. Bagi Kanada TPP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin. Berbeda dengan kerja sama yang lain, TPP tidak hanya mencakup sektor ekonomi, namun juga sektor agrikultur dan pertanian. TPP merupakan sebuah perjanjian komprehensif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan abad ke-21. Kanada belum memiliki perjanjian internasional ataupun negosiasi lainnya yang memiliki cakupan seluas TPP. TPP merupakan jalan pembuka untuk Kanada memasuki pasar baru di kawasan Asia Pasifik, yang saat ini menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat.

Kesempatan tersebut bisa membuka peluang Kanada untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kapasitas ekspor dan diharapkan akan membawa dampak positif lainnya untuk perekonomian Kanada, serta mempererat hubungan kerja sama Kanada dengan berbagai negara anggota lainnya. Dalam penjabaran diatas dapat dilihat bahwa tujuan suatu negara dalam melakukan kerja sama internasional adalah untuk meraih kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dicapai di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Robert O. Keohane (1989) dalam konsep kerja sama Internasional yakni kerja sama internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, suatu negara melakukan kerja sama internasional dapat

disebabkan karena adanya saling ketergantungan antar negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, suatu negara membutuhkan negara lainnya maka dari itu diperlukan adanya kerja sama. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh William Zartman (2010) dalam bukunya yang berjudul *International Cooperation*, yang menyebutkan bahwa:

"A common reason for cooperation is interdependence. States are not politically or economically autarkic; they are not alone. They need the active or passive help of others in order to achieve their goals. They need others as allies to help assure their security, they need them for establishing rules of international behaviour, they need them for commerce and as partners in managing international economic relations, and they need them to help protect from public bads such as environmental risks. Calculations of efficiency accompany the needs generated by interdependence: states may believe that it would cost them less to achieve their goals by cooperating with others than to act alone."

Meskipun pada awalnya *supply management* menjadi hambatan terbesar untuk bergabungnya Kanada dalam TPP karena aturan *supply management* bertentangan dengan perjanjian TPP. Namun, hal ini tidak menghentikan upaya pemerintah Kanada untuk tetap bergabung dalam TPP. Pemerintah Kanada telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan *lobbying* dengan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Kanada secara aktif mengadakan pertemuan dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk di dalamnya yaitu pemilik usaha, *think tanks*, akademisi, masyarakat sipil, kelompok adat, pelajar dari semua wilayah dan provinsi. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil positif bagi pemerintah Kanada, yang mana Kanada berhasil mendapatkan undangan untuk bergabung menjadi anggota TPP dan dapat mencapai kepentingan nasionalnya (Bobby, 2018).

Kepentingan Ekonomi Kanada

Melalui kerja sama TPP Kanada telah membuka jalan kerja sama perdagangan dan menjalin FTA baru dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada awalnya Kanada telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara anggota TPP, yakni Amerika Serikat dan Meksiko melalui NAFTA, serta Chili dan Peru berdasarkan FTA Kanada-Chili dan Kanada-Peru. Kemudian melalui Perjanjian TPP Kanada memiliki FTA baru dengan tujuh negara di kawasan Asia Pasifik, diantaranya negara Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Perdagangan bilateral Kanada dengan ketujuh mitra tersebut termasuk didalamnya untuk barang dan jasa.

Ekspor Kanada ke negara-negara FTA baru akan meningkat sebesar US\$2.2 *billion*. Peluang ekspor Kanada yang paling dominan yakni ke Jepang, ekspor Kanada ke Jepang akan meningkat sebesar US\$1.1 *billion* dengan komoditas ekspor berupa daging babi dan sapi serta produk ekspor terbesar berupa produk kayu. Selain itu, peluang ekspor Kanada juga akan mengalami peningkatan ke Australia, Vietnam dan Malaysia. Adapun komoditas ekspor Kanada ke Australia dan Malaysia yakni berupa ekspor mesin dan peralatannya serta perlengkapan transportasi. Komoditas ekspor Kanada ke Vietnam berupa produk makanan dan otomotif. Kerja sama Kanada dengan mitra dagang baru mencapai US\$50 *billion* per tahun (Thomassin, 2018).

Bagi Kanada, negara-negara TPP secara keseluruhan akan menjadi mitra dagang terbesar Kanada dengan lebih dari 70 persen perdagangan dan investasi Kanada mengalir melalui kawasan Asia Pasifik. Bergabungnya Kanada dalam kerja sama TPP akan menghasilkan keuntungan PDB jangka panjang bagi Kanada yakni sebesar CAD\$4.3 *billion* (US\$3.3 *billion*) yang mana proyeksi keuntungan ini terutama didorong oleh akses terhadap FTA baru Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa Kanada telah mencapai

kepentingan ekonomi negaranya melalui kerja sama TPP (Government of Canada, 2021).

Kepentingan Politik dan Strategis Kanada

Pemerintah Kanada melihat aspek jangka panjang dari keikutsertaannya dalam kerja sama TPP yang tidak hanya dilihat melalui aspek kepentingan ekonomi dan perdagangan saja, melainkan terdapat kepentingan lainnya yang ingin dicapai oleh pemerintah Kanada. Adapun kepentingan lainnya yang diproyeksikan oleh pemerintah Kanada dalam kurun waktu lima tahun kedepan melalui keikutsertaannya pada kerjasama TPP di tahun 2011 hingga 2016 yakni kepentingan dalam bidang politik dan strategis. Kepentingan politik dan strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap kebijakan dan kerjasama memiliki tujuan politik dan strategis yang ingin dicapai.

Begitupun dengan pemerintah Kanada yang memiliki kepentingan politik dan strategis di balik keikutsertaannya dalam kerja sama TPP. Kepentingan politik dan strategis yang dimaksud adalah *Canada: Strengthen Ties with the Indo-Pacific Region and Beyond*. Pemerintah Kanada melalui kebijakan politik dan strategisnya menekankan pada keinginan Kanada untuk memfokuskan dan memperkuat keterlibatannya di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya melalui TPP. *Canada: Strengthen Ties with the Indo-Pacific Region and Beyond* mencakup lima pilar utama, yaitu; 1) Mempromosikan perdamaian, ketahanan, dan keamanan, 2) Memperluas perdagangan, investasi, dan ketahanan rantai pasokan dengan memperluas akses pasar, 3) Berinvestasi dan berkomunikasi, 4) Membangun masa depan yang berkelanjutan, dan 5) Memperluas kehadiran dan pengaruh Kanada.

Kepentingan nasional dalam bidang politik dan strategis inilah yang kemudian menjadi dasar kesepakatan pemerintah Kanada untuk meratifikasi perjanjian kerja sama TPP pada tanggal 4 Februari 2016. Pemerintah Kanada memandang bahwa proyeksi ke depan dari keikutsertaan Kanada dalam TPP ini akan

membawa dampak positif bagi Kanada terutama dalam misi untuk memperluas kehadiran dan pengaruh Kanada di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya (Smith, 2023). Kemudian kerja sama perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) berubah nama menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setelah negara Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari TPP pada tahun 2017.

CPTPP terdiri dari sebelas negara anggota yakni Australia, Brunei, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, Jepang dan Kanada. Kanada kemudian secara resmi menyetujui dan menandatangani perjanjian CPTPP pada tanggal 8 Maret 2018 di Santiago, Chili (Stephens, 2023). Meskipun TPP telah berubah nama menjadi CPTPP, Kanada tetap melihat bahwa kerja sama ini bukanlah sekedar kerja sama dalam bidang ekonomi saja melainkan CPTPP lebih dari itu. CPTPP tetap menjadi batu loncatan bagi Kanada untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam bidang politik dan strategis Kanada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditandai dengan dicetuskannya CPTPP sebagai pilar strategi bagi Kanada untuk kawasan Indo-Pasifik *"The CPTPP As A Pillar of Canada's Indo-Pacific Strategy"* oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau pada tahun 2018. CPTPP menjadi pilar utama dalam pengembangan strategi Indo-Pasifik Kanada untuk menunjukkan perannya di kawasan Indo-Pasifik.

Pada dasarnya kebijakan ini merupakan proyeksi lanjutan dari pilar kelima dalam *Canada: Strengthen Ties with the Indo-Pacific Region and Beyond* yakni memperluas kehadiran dan pengaruh Kanada di kawasan Asia Pasifik. Adapun Kepentingan Politik dan strategis Kanada dalam keikutsertaannya di kerja sama CPTPP, diantaranya; 1) Menjalin dan mempererat kembali hubungan diplomatik dengan China melalui *"The Strengthening and Expansion of The CPTPP"*, dan 2) Menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN

(*Association of Southeast Asian Nations*) khususnya negara yang belum tergabung dalam CPTPP, seperti negara Indonesia dan Thailand melalui *"The Strengthening and Expansion of The CPTPP"*.

Berdasarkan analisis peneliti melalui penjabaran data di atas didapatkan dilihat bahwa terdapat kepentingan lain yakni kepentingan dalam bidang politik dan strategis yang ingin dicapai oleh pemerintah Kanada melalui keikutsertaannya dalam kerja sama CPTPP. Yang ditandai dengan dibentuknya *The CPTPP As A Pillar of Canada's Indo-Pacific Strategy* oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau pada tahun 2018. Pada dasarnya, pencapaian pemerintah Kanada melalui kepentingan politik dan strategis ini juga berdampak positif bagi kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Adapun keberhasilan pemerintah Kanada melalui kebijakan politik dan strategisnya ini telah memberikan keuntungan yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi Kanada.

Hal ini ditandai dengan bertambahnya akses pasar bagi Kanada di pasar Asia Pasifik dan meningkatnya ekspor untuk produk pertanian Kanada di negara Asia terutama dengan China. Seperti meningkatnya nilai ekspor produk Kanada untuk komoditas tanaman kanola (*canola seed*) dan daging babi Kanada ke China sebesar US\$ 9.4 billion di tahun 2022 dari US\$ 3.89 billion di tahun 2019 atau meningkat sebesar US\$ 5,51 billion (Robert, 2023). Kemudian meningkatnya ekspor produk Kanada di pasar Asia Pasifik dan negara anggota ASEAN, seperti; 1) Meningkatnya ekspor daging sapi Kanada ke Jepang sebesar 70% dari 26.000 ton di tahun 2018 menjadi 45.000 ton di tahun 2022, 2) Ekspor daging sapi Kanada ke Vietnam meningkat sepuluh kali lipat dari 1.000 ton di tahun 2018 menjadi 10.000 ton pada tahun 2022, dan 3) Ekspor gandum Kanada ke Malaysia meningkat 35% dari 175.000 ton di tahun 2018 menjadi 235.000 ton di tahun 2022 (Robert, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa CPTPP merupakan wadah bagi Kanada untuk menjalin kerja sama dengan negara lain di kawasan Asia

Pasifik dan atau menjalin kerja sama dengan organisasi regional yang ada, seperti ASEAN. Kanada melihat aspek jangka panjang dengan proyeksi keuntungan yang lebih besar dari keikutsertaannya dalam CPTPP. Selain itu, CPTPP juga menjadi pilar utama Kanada untuk pengembangan strategi Indo Pasifik baru dalam menentukan perannya di Kawasan dalam menghadapi upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik tanpa berkomitmen untuk bergabung kembali dengan CPTPP.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa kepentingan pemerintah Kanada bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau yang kini bernama *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), yakni karena adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah Kanada. Kepentingan nasional tersebut tidak serta merta berupa kepentingan dalam bidang ekonomi dan perdagangan saja melainkan kepentingan dalam bidang lainnya, seperti kepentingan dalam bidang politik dan strategis. Pemerintah Kanada telah membentuk *The CPTPP As A Pillar of Canada's Indo-Pacific Strategy*, strategi ini digagas oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau pada tahun 2018.

Pada dasarnya kebijakan ini merupakan proyeksi lanjutan dari pilar kelima dalam *Canada: Strengthen Ties with the Indo-Pacific Region and Beyond* yakni memperluas kehadiran dan pengaruh Kanada di kawasan Asia Pasifik. CPTPP menjadi pilar utama dalam pengembangan strategi Indo-Pasifik Kanada untuk menunjukkan peran dan potensinya di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini juga merupakan suatu gebrakan bagi Kanada untuk mencapai kepentingan nasional Kanada di kawasan Indo-Pasifik. Adapun Kepentingan Politik dan strategis Kanada dalam keikutsertaannya dalam kerja sama CPTPP, diantaranya; Menjalinkan dan mempererat kembali

hubungan diplomatik dengan China melalui *The Strengthening and Expansion of The CPTPP* dan Menjalinkan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) khususnya negara yang belum tergabung dalam CPTPP, seperti negara Indonesia dan Thailand melalui *The Strengthening and Expansion of The CPTPP*.

Jika dilihat dari hambatan-hambatan dan juga kendala Kanada untuk bergabung ke dalam TPP, seperti tidak disambut baik oleh negara anggota TPP, kacaunya *supply management* dan aksi protes dari DFC. Serta dampak signifikan yang akan ditimbulkan bagi perekonomian Kanada jika Pemerintah Kanada tetap memaksakan untuk bergabung ke dalam TPP. Akan tetapi, pemerintah Kanada tetap berupaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya karena bagi Kanada TPP bukan hanya sekedar kerja sama dalam bidang ekonomi dan atau perdagangan antar negara saja, melainkan TPP lebih dari itu.

Bagi Kanada TPP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah Kanada melihat aspek jangka panjang dengan proyeksi keuntungan yang lebih besar dari keikutsertaannya dalam CPTPP. Selain itu, CPTPP juga menjadi pilar utama Kanada untuk pengembangan strategi Indo Pasifik baru dalam menentukan perannya di Kawasan dalam menghadapi upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik tanpa berkomitmen untuk bergabung kembali dengan CPTPP.

Daftar Pustaka

Buku:

- Holsti, K.J. (1988). *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga
- Kelsey, J. (Ed.). (2011). *No Ordinary Deal Unmasking The Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement*. Australia: The National Library of Australia

- Keohane, R. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th Ed.). Pearson Education.
- Jurnal Artikel:**
- Agnesalamah, R. A. (2017). *Kepentingan Nasional India Dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO)*. *JOM FISIP*, 1(2), 1-9.
- Aisyah, R. (2016). *Keikutsertaan Kanada dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership: Sebuah Analisa Liberal Intergovernmentalism*. *Jurnal Transformasi Global*, 3(2), 170-185.
- Canadian Dairy Sector Overview. (2018). Dairy Farmers of Canada. 6-27.
- Nuzulurridha, M. (2017). *Kepentingan Amerika Serikat Menyepakati Trans Pacific Partnership (TPP) di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2015*. *JOM FISIP*, 4(2), 1-9.
- Internet:**
- Bobby, B. (2018). *Trans-Pacific Partnership Dalam Bingkai Nawacita*. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 3. Retrieved <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/297CNN>
- Indonesia. (2017). *Trump Bawa AS Resmi Keluar Dari TPP*. Retrieved <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170124011942-134-188433/trump-bawa-as-resmi-keluar-dari-tpp>
- Dairyfarmersofcanada.ca. (2021). *Dairy Business The Future of Dairy*. Retrieved <https://dairyfarmersofcanada.ca/en/blue-cow-logo/processors>
- Dairy Processors Association of Canada. (2024). *Comprehensive and Progressive Agreement for The Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*. Retrieved <https://www.dpac-atlc.ca/trade-agreements/cptpp/>
- Government of Alberta. (2023). *Dairy Producer in Alberta*. Retrieved <https://alis.alberta.ca/occinfo/occupations-in-alberta/occupation-profiles/dairy-producer/>
- International.gc.ca. (2024). *Canada-Taiwan Relation*. Retrieved <https://www.international.gc.ca/country-pays/taiwan/reasons.aspx?lang=eng>
- Kim, Tae. (2018). *Trump's big fight with Canada over dairy gets the US onli \$70 million more than TTP trade deal*. Retrieved <https://www.cnbc.com/2018/10/02/trumps-dairy-fight-with-canada-gets-only-70-million-more-than-tpp.html>
- Mister Eksportir. (2019). *Inilah Daftar Komoditas Ekspor Impor Kanada yang Luar Biasa*. Retrieved <https://misterexportir.com/komoditas-ekspor-impor-canada/>
- Nerestant, Antoni/CBC. (2015). *Quebec farmers, caws protest ahead of federal leaders debate proposed TPP would hurt dairy industry*. Retrieved <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-dairy-farmers-crash-leaders-debate-1.3241618>
- Parliamentary of Canada. (2015). *Canada's Supply Management System in Brief*. Retrieved https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/2015138E
- Trading Economy. (2020). *Canada GDP Data*. Retrieved <https://tradingeconomics.com/canada/gdp#:~:text=GDP%20in%20Canada%20is%20expected,according%20to%20our%20econometric%20models>.
- Wigell, M. (2016). *Conceptualizing regional powers' geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism*. Retrieved <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10308-015-0442-x.pdf>
- Yeung, Chloe. (2024). *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Fact Sheet*. Retrieved <https://www.asiapacific.ca/publication/>

explainer-CPTPP-Canada-2024-
overview